

Kesetaraan Akses Digital

Wahida Suddin

Universitas Muhammadiyah Makassar
Wahidasuddin41@gmail.com

Muh Akbar

Universitas Muhammadiyah Makassar
andika281200@gmail.com

Nur Riswandi Marsuki

Universitas Muhammadiyah Makassar
riswandymarsuki@gmail.unismuhac.id

Jl. Sultan Alauddin No.259: Universitas Muhammadiyah Makassar

***Abstract.** The goal of equal digital access is to create a digitally inclusive society, where everyone has the same opportunity to access, understand and utilize digital technology in their daily lives. Digital access equality functions are critical in an increasingly digitally connected society, as they help create a more inclusive, equitable and sustainable environment for all individuals.*

***Keywords:** equality of digital access*

ABSTRAK. Tujuan kesetaraan akses digital adalah menciptakan masyarakat yang inklusif secara digital, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fungsi kesetaraan akses digital sangat penting dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, karena mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Kata kunci: kesetaraan akses digital

LATAR BELAKANG

Hak digital adalah seperangkat Hak Asasi Manusia universal yang memastikan setiap orang – terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, gender, dan lainnya – memiliki akses yang sama terhadap internet terbuka yang dikelola secara inklusif, akuntabel, dan transparan, untuk memastikan terjaminnya kebebasan dan hak-hak mendasar milik rakyat. Perkembangan digital Indonesia, yang dapat diukur dari adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berkembang dengan pesat yang didorong oleh adanya pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami pertumbuhan pesat, distribusi terhadap pengadopsian teknologi di Indonesia masih belum merata sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah. (Susanti et al., 2022)

Indonesia mencatat kenaikan jumlah pengguna internet sebesar [215,6 juta](#) pada tahun 2023 yang melampaui angka sebelum pandemi yaitu sebesar 196,7 juta di tahun 2019.

Pertumbuhan dalam penggunaan internet tercermin lebih lanjut, yang menunjukkan peningkatan konsisten dalam skor keseluruhan yaitu 38,5 dengan bertambahnya 3,3 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menyoroti kemajuan akses digital provinsi menengah dan bawah. Sektor TIK berperan penting dalam meningkatkan skor EV-DCI di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, Jawa Tengah, mengalami peningkatan yang signifikan dari posisi ke-14 menjadi posisi ke-6 dengan skor 48,1. Hal ini disebabkan oleh fokus pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan pilar Penggunaan TIK khususnya dalam inisiatif *smart city*. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung naik 12 peringkat menjadi posisi ke-17 dengan skor 39,5. Pilar Pengeluaran TIK di provinsi tersebut meningkat karena pemerintah yang mendukung peningkatan kapasitas digital UMKM. (Desmawati et al., 2023)

KAJIAN TEORITIS

Meskipun ada kemajuan di area pedesaan, kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan masih terus terjadi di Indonesia. Peta di bawah ini mengilustrasikan penetrasi internet pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya kesenjangan dengan warna lebih gelap menunjukkan tingkat populasi dengan akses internet yang lebih besar. Terfokusnya akses internet di Indonesia bagian barat dan wilayah perkotaan menekankan kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan digital melalui peningkatan distribusi infrastruktur TIK. (Manurung & Lestari, 2020)

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 dalam [laporan](#) East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023\Kurangnya pengetahuan digital dan terbatasnya adopsi teknologi di Indonesia tergambar dengan adanya tiga dari 10 besar provinsi dengan skor EV-DCI 2023 tertinggi yang masih memiliki indeks literasi digital lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menghambat adopsi teknologi dan kurangnya kualitas talenta digital di Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa hanya 50% dari talenta digital di Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah, sementara hanya 1% memiliki keahlian tingkat lanjut di bidang seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). (Wahidin et al., 2022)

METODE PENELITIAN

1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet

Pemerintah secara aktif memprioritaskan peningkatan lanskap infrastruktur digital untuk memperluas akses digital, khususnya mendorong pemerataan ketersediaan internet. Komitmen yang patut dicontoh dalam hal ini adalah peluncuran [Satelit Satria](#) baru-baru ini yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memperluas cakupan di daerah-daerah yang belum terjangkau.

2. Mengembangkan ekosistem digital

Perusahaan *startup* dan pemerintah dapat mengembangkan ekosistem digital melalui kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital. Sebagai contoh, perusahaan portofolio East Ventures, seperti [Mekari](#) dan [Tokopedia](#), mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk menyelenggarakan [program literasi digital pemerintah](#) “UMKM Digital Cemerlang Melaju Bersama Kementerian Kominfo”. Melalui kolaborasi ini, *startup* digital dan pemerintah dapat membagikan pengetahuan dan teknologi digital secara langsung kepada ratusan UMKM di Indonesia, sementara pemerintah memfasilitasi program tersebut. Selain itu, Kominfo meluncurkan [HUB.ID](#), sebuah platform yang melayani *startup* lokal pasca-seed untuk mendorong pengembangan dan inklusivitas di tingkat regional. (Istiarni & Kurniasari, 2020)

3. Memprioritaskan keamanan siber

Di era revolusi digital, kita menghadapi berbagai tantangan keamanan siber. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi untuk melindungi ekosistem digital sangatlah penting. [Peris.ai](#), sebuah perusahaan rintisan (*startup*) yang didanai East Ventures, menyediakan layanan keamanan siber yang berbasis di Indonesia, menjadi yang terdepan dalam memberdayakan organisasi-organisasi di Indonesia melalui layanan keamanan siber yang komprehensif dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memitigasi ancaman digital secara efektif. (Nurhadi et al., 2023)

4. Memanfaatkan Artificial Intelligence (AI)

AI dapat merevolusi sektor TIK dan meningkatkan PDB Indonesia sebesar [12%](#) pada tahun 2030 melalui ekonomi digital dan kemajuan teknologi. Pemerintah menyadari potensi untuk memanfaatkan peluang AI dan telah mengembangkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (STRANAS KA) 2020-2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bekerja sama dengan [Nodeflux](#), *startup* yang didanai oleh East Ventures, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memasang teknologi AI yang disebut [VisionAire](#) di 278 area di kota tersebut untuk memantau batas ketinggian air. Di Jawa Timur, pemerintah juga telah menerapkan teknologi AI di 11 titik. (Tri Suminar et al., 2022)

Mengatasi kesenjangan digital dan mewujudkan akses digital yang merata membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Memprioritaskan adopsi teknologi, berinvestasi pada infrastruktur yang kuat, mempromosikan literasi digital, dan membina kolaborasi merupakan langkah penting dalam memberdayakan populasi yang kurang

terlayani dan menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi transformatif dari teknologi, kita dapat membuka jalan menuju masa depan di mana akses digital yang merata menjadi nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan digital Indonesia, yang dapat diukur dari adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berkembang dengan pesat yang didorong oleh adanya pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami pertumbuhan pesat, distribusi terhadap pengadopsian teknologi di Indonesia masih belum merata sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah. (Prabowo & Irwansyah, 2018)

Indonesia mencatat kenaikan jumlah pengguna internet sebesar [215,6 juta](#) pada tahun 2023 yang melampaui angka sebelum pandemi yaitu sebesar 196,7 juta di tahun 2019. Pertumbuhan dalam penggunaan internet tercermin lebih lanjut dalam [East Ventures – Digital Competitiveness Index \(EV-DCI\) 2023](#) yang menunjukkan peningkatan konsisten dalam skor keseluruhan yaitu 38,5 dengan bertambahnya 3,3 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menyoroti kemajuan akses digital provinsi menengah dan bawah. KRISIS pandemi covid-19 melahirkan kebijakan pemerintah yang juga memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Namun, untuk mengatasi kelemahan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar program-program sosial. Pemerintah perlu menjembatani kesenjangan digital. Selama pandemi, program bantuan sosial untuk ‘kelompok menengah yang hilang’, yaitu pekerja informal yang dikeluarkan dari kelompok penerima jaminan sosial. Itu karena tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bantuan sosial yang ditargetkan untuk kelompok sangat miskin sangat bergantung pada teknologi digital. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan telepon genggam pintar (smartphone). Pemerintah memverifikasi penerima dengan menggunakan sistem identifikasi digital. Pembayaran ditransfer ke rekening penerima. Penggunaan teknologi ini mempermudah prosedur dan memungkinkan pekerja untuk menghindari kontak muka satu sama lain pada saat mengajukan permohonan dan pada saat menerima bantuan tunainya

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko. Sebagai perbandingan, pada saat pemerintah Afrika Selatan memperkenalkan bantuan sosial tunai bagi orang dewasa yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk lain selama pandemi, permohonan harus disampaikan melalui formulir yang diunduh dari website, Whatsapp, dan e-mail. Ini tentunya memberikan efisiensi, tapi sebagian formulir permohonan ini tidak bisa diakses pekerja karena hampir 90% pekerja tidak memiliki telepon genggam pintar. Sebagian besar masih memiliki

telepon genggam lama yang tidak ada aplikasi internetnya, juga sebagian pekerja tidak memiliki uang untuk menggunakan wi-fi

berasal dari desa, mereka harus pulang ke desa untuk mengurus kartunya dan juga jika nomor telepon genggamnya beda, harus di mutakhirkan data nomor telepon genggamnya. Laporan PBB 2019 tentang kemiskinan dan hak asasi manusia menemukan bahwa digitalisasi kesejahteraan cenderung menurunkan secara signifikan anggaran kesejahteraan secara keseluruhan, menghilangkan beberapa jasa pelayanan, dan memperkecil jumlah kelompok penerima bantuan tunai. Sistem ini justru seolah-olah menghukum kaum miskin. Seharusnya Kendala lainnya ialah keawaman dalam melengkapi formulir dan proses administrasi yang harus dilakukan jika permohonan awal ditolak. Cerita yang sama terjadi di seluruh dunia. Di Mexico City, bantuan tunai yang diberikan kepada pekerja tidak tetap, pada awalnya hanya dapat diakses melalui permohonan daring. Ada yang sampai tiga kali mencoba memindai dokumen dan mengirim e-mail. Bagaimana jika pekerja tidak bisa baca tulis dan tidak mampu bayar sewa internetnya. Akhirnya, pemerintah Mexico menyediakan juga formulir permohonan yang bisa dilengkapi secara manual. Begitu juga di Delhi, pekerja informal berjuang untuk menggunakan aplikasi digital yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung pedagang kaki lima. Bukan hanya karena aplikasi tersedia secara daring, melainkan juga tidak ditulis dalam bahasa Hindi baku dan website sering putus. Pemohon juga diharuskan memiliki kartu identifikasi yang terhubung dengan data biometri dan demografi yang juga terhubung dengan nomor telepon genggam, yang juga menimbulkan masalah-masalah lainnya. Tidak semua memiliki kartu identifikasi tersebut. Jika mereka merupakan pekerja musiman yang, teknologi yang ada tidak boleh digunakan untuk mengurangi anggaran dan mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke organisasi yang mengurus kaum miskin. Pemerintah yang menggunakan teknologi digital untuk program kesejahteraan sosial harus memastikan adanya penyertaan pemerintah dalam sistem dan lembaga di mana program ini melekat. Untuk awalnya, dengan pemerintah melakukan investasi dalam transisi digital, pemerintah juga harus mendukung organisasi perdesaan dengan memberikan pelayanan dasar guna menghubungkan masyarakat

Pemerintah juga perlu membuat mekanisme untuk melakukan konsultasi yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi ini, dalam usaha mendesain program-program yang memenuhi kebutuhan kelompok yang dituju, memonitor dan melakukan asesmen perkembangannya, dan melakukan perubahan yang diperlukan. Pekerja birokrasi di baris depan/frontliner seperti pekerja sosial dan petugas registrasi perlu dukungan penuh. Tentunya

menutupi kesenjangan digital harus menjadi prioritas utama. Artinya, perluasan akses teknologi digital dilakukan dengan tersedianya telepon genggam pintar, internet kecepatan tinggi, dan memastikan orang memiliki pengetahuan untuk menggunakannya. Organisasi-organisasi perdesaan memiliki peranan penting juga. Namun, untuk waktu sekarang, kesenjangan digital harus segera dijumpai untuk memungkinkan kelompok yang lemah atau miskin dapat dengan mudah mengakses bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan. (Prabowo & Irwansyah, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet

Pemerintah secara aktif memprioritaskan peningkatan lanskap infrastruktur digital untuk memperluas akses digital, khususnya mendorong pemerataan ketersediaan internet. Komitmen yang patut dicontoh dalam hal ini adalah peluncuran [Satelit Satria](#) baru-baru ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memperluas cakupan di daerah-daerah yang belum terjangkau.

2. Mengembangkan ekosistem digital

Perusahaan *startup* dan pemerintah dapat mengembangkan ekosistem digital melalui kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital. Sebagai contoh, perusahaan portofolio East Ventures, seperti [Mekari](#) dan [Tokopedia](#), mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk menyelenggarakan [program literasi digital pemerintah](#) “UMKM Digital Cemerlang Melaju Bersama Kementerian Kominfo”. Melalui kolaborasi ini, *startup* digital dan pemerintah dapat membagikan pengetahuan dan teknologi digital secara langsung kepada ratusan UMKM di Indonesia, sementara pemerintah memfasilitasi program tersebut. Selain itu, Kominfo meluncurkan [HUB.ID](#), sebuah platform yang melayani *startup* lokal pasca-seed untuk mendorong pengembangan dan inklusivitas di tingkat regional. (Istiarni & Kurniasari, 2020)

3. Memprioritaskan keamanan siber

Di era revolusi digital, kita menghadapi berbagai tantangan keamanan siber. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi untuk melindungi ekosistem digital sangatlah penting. [Peris.ai](#), sebuah perusahaan rintisan (*startup*) yang didanai East Ventures, menyediakan layanan keamanan siber yang berbasis di Indonesia, menjadi yang terdepan dalam memberdayakan organisasi-organisasi di Indonesia melalui layanan keamanan siber yang komprehensif dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memitigasi ancaman digital secara efektif. (Nurhadi et al., 2023)

4. Memanfaatkan Artificial Intelligence (AI)

AI dapat merevolusi sektor TIK dan meningkatkan PDB Indonesia sebesar [12%](#) pada tahun 2030 melalui ekonomi digital dan kemajuan teknologi. Pemerintah menyadari potensi untuk memanfaatkan peluang AI dan telah mengembangkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (STRANAS KA) 2020-2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bekerja sama dengan [Nodeflux](#), *startup* yang didanai oleh East Ventures, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memasang teknologi AI yang disebut [VisionAIre](#) di 278 area di kota tersebut untuk memantau batas ketinggian air. Di Jawa Timur, pemerintah juga telah menerapkan teknologi AI di 11 titik. (Tri Suminarl □, 2022)

Mengatasi kesenjangan digital dan mewujudkan akses digital yang merata membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Memprioritaskan adopsi teknologi, berinvestasi pada infrastruktur yang kuat, mempromosikan literasi digital, dan membina kolaborasi merupakan langkah penting dalam memberdayakan populasi yang kurang terlayani dan menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi transformatif dari teknologi, kita dapat membuka jalan menuju masa depan di mana akses digital yang merata menjadi nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan digital Indonesia, yang dapat diukur dari adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berkembang dengan pesat yang didorong oleh adanya pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami pertumbuhan pesat, distribusi terhadap pengadopsian teknologi di Indonesia masih belum merata sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah. (Prabowo & Irwansyah, 2018)

Indonesia mencatat kenaikan jumlah pengguna internet sebesar [215,6 juta](#) pada tahun 2023 yang melampaui angka sebelum pandemi yaitu sebesar 196,7 juta di tahun 2019. Pertumbuhan dalam penggunaan internet tercermin lebih lanjut dalam [East Ventures – Digital Competitiveness Index \(EV-DCI\) 2023](#) yang menunjukkan peningkatan konsisten dalam skor keseluruhan yaitu 38,5 dengan bertambahnya 3,3 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menyoroti kemajuan akses digital provinsi menengah dan bawah. KRISIS pandemi covid-19 melahirkan kebijakan pemerintah yang juga memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Namun, untuk mengatasi kelemahan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar program-program sosial. Pemerintah perlu menjembatani kesenjangan digital. Selama pandemi, program bantuan sosial untuk ‘kelompok menengah yang hilang’, yaitu pekerja informal yang dikeluarkan dari kelompok penerima jaminan sosial. Itu karena tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bantuan sosial yang ditargetkan untuk

kelompok sangat miskin sangat bergantung pada teknologi digital. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan telepon genggam pintar (smartphone). Pemerintah memverifikasi penerima dengan menggunakan sistem identifikasi digital. Pembayaran ditransfer ke rekening penerima. Penggunaan teknologi ini mempermudah prosedur dan memungkinkan pekerja untuk menghindari kontak muka satu sama lain pada saat mengajukan permohonan dan pada saat menerima bantuan tunainya

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko. Sebagai perbandingan, pada saat pemerintah Afrika Selatan memperkenalkan bantuan sosial tunai bagi orang dewasa yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk lain selama pandemi, permohonan harus disampaikan melalui formulir yang diunduh dari website, Whatsapp, dan e-mail. Ini tentunya memberikan efisiensi, tapi sebagian formulir permohonan ini tidak bisa diakses pekerja karena hampir 90% pekerja tidak memiliki telepon genggam pintar.

Sebagian besar masih memiliki telepon genggam lama yang tidak ada aplikasi internetnya, juga sebagian pekerja tidak memiliki uang untuk menggunakan wi-fi berasal dari desa, mereka harus pulang ke desa untuk mengurus kartunya dan juga jika nomor telepon genggamnya beda, harus di mutakhirkan data nomor telepon genggamnya. Laporan PBB 2019 tentang kemiskinan dan hak asasi manusia menemukan bahwa digitalisasi kesejahteraan cenderung menurunkan secara signifikan anggaran kesejahteraan secara keseluruhan, menghilangkan beberapa jasa pelayanan, dan memperkecil jumlah kelompok penerima bantuan tunai. Sistem ini justru seolah-olah menghukum kaum miskin. Seharusnya Kendala lainnya ialah keawaman dalam melengkapi formulir dan proses administrasi yang harus dilakukan jika permohonan awal ditolak.

Cerita yang sama terjadi di seluruh dunia. Di Mexico City, bantuan tunai yang diberikan kepada pekerja tidak tetap, pada awalnya hanya dapat diakses melalui permohonan daring. Ada yang sampai tiga kali mencoba memindai dokumen dan mengirim e-mail. Bagaimana jika pekerja tidak bisa baca tulis dan tidak mampu bayar sewa internetnya. Akhirnya, pemerintah Mexico menyediakan juga formulir permohonan yang bisa dilengkapi secara manual. Begitu juga di Delhi, pekerja informal berjuang untuk menggunakan aplikasi digital yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung pedagang kaki lima. Bukan hanya karena aplikasi tersedia secara daring, melainkan juga tidak ditulis dalam bahasa Hindi baku dan website sering putus. Pemohon juga diharuskan memiliki kartu identifikasi yang terhubung dengan data biometri dan demografi yang juga terhubung dengan nomor telepon genggam, yang juga menimbulkan masalah-masalah lainnya.

Tidak semua memiliki kartu identifikasi tersebut. Jika mereka merupakan pekerja musiman yang, teknologi yang ada tidak boleh digunakan untuk mengurangi anggaran dan mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke organisasi yang mengurus kaum miskin. Pemerintah yang menggunakan teknologi digital untuk program kesejahteraan sosial harus memastikan adanya penyertaan pemerintah dalam sistem dan lembaga di mana program ini melekat. Untuk awalnya, dengan pemerintah melakukan investasi dalam transisi digital, pemerintah juga harus mendukung organisasi perdesaan dengan memberikan pelayanan dasar guna menghubungkan masyarakat.

Pemerintah juga perlu membuat mekanisme untuk melakukan konsultasi yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi ini, dalam usaha mendesain program-program yang memenuhi kebutuhan kelompok yang dituju, memonitor dan melakukan asesmen perkembangannya, dan melakukan perubahan yang diperlukan. Pekerja birokrasi di baris depan/frontliner seperti pekerja sosial dan petugas registrasi perlu dukungan penuh. Tentunya menutupi kesenjangan digital harus menjadi prioritas utama. Artinya, perluasan akses teknologi digital dilakukan dengan tersedianya telepon genggam pintar, internet kecepatan tinggi, dan memastikan orang memiliki pengetahuan untuk menggunakannya. Organisasi-organisasi perdesaan memiliki peranan penting juga. Namun, untuk waktu sekarang, kesenjangan digital harus segera dijabatani untuk memungkinkan kelompok yang lemah atau miskin dapat dengan mudah mengakses bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan. (Prabowo & Irwansyah, 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesenjangan dalam penggunaan internet di kalangan digital native di pedesaan. Hal ini tentunya dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan pemerataan skill digital ke seluruh pelosok Indonesia. Dampak lain dari digitalisasi yang cepat di seluruh Indonesia, dan bahkan secara global, juga mengganggu tenaga kerja. Skill yang diperlukan untuk pekerja sudah berubah, karena mereka harus melek teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas SDM masih jauh dari baik. Kesenjangan digital atau gap digital skill masih ada karena kepemilikan ponsel tidak selalu berarti kesetaraan dalam penggunaan digital. Teknologi dan perangkat yang digunakan orang dan skill digital yang dimiliki menentukan peluang mereka di kehidupan sehari-hari.

Mereka yang tahu bagaimana menggunakan internet akan terus mendapat manfaat. Selanjutnya, walaupun banyak program peningkatan skill digital yang telah dilakukan tetap saja pemerintah masih belum bisa mengisi kekosongan di keterampilan digital. Hal ini

dapat dilihat dari kurang maksimal dalam penerapan pelatihan pada tempat kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, diperlukan peran swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam berinvestasi secara merata agar manfaat teknologi digital dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi tersebut diantaranya dengan penyediaan infrastruktur internet yang mudah untuk diakses publik, sarana, dan mentoring dari praktisi untuk literasi digital, juga diperlukan peran komunitas lokal sebagai motor penggerak dalam literasi digital kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Desmawati, L., Fakhruddin, F., Muarifuddin, M., & Hastuti, R. D. (2023). Literasi Digital dalam Pemenuhan Asesmen Kompetensi Minimum bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 312–317. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32028>
- Istiarni, A., & Kurniasari, E. (2020). Peran Perpustakaan Digital Dalam Menciptakan Ruang Publik (Studi Kasus Perpustakaan Digital Universitas Lampung). *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(1), 31. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.151.31-53>
- Manurung, E. A. pinondang, & Lestari, E. A. P. (2020). Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>
- Nurhadi, M., Mulyana, E., Nurhayati, S., & Sukmana, C. (2023). Implementasi Program Pelatihan Literasi Keuangan Berbasis Teknologi Digital Pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Di Pkbm Ash-Shoddiq. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 15(2), 288–294. <https://doi.org/10.26418/jvip.v15i2.63759>
- Prabowo, T. L., & Irwansyah, I. (2018). Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri kepada Masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(3), 382. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>
- Susanti, L. D., Indrianti, D. T., Hilmi, M. I., & Handayani, S. M. (2022). Literasi Digital: Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Dasa Wisma di Kabupaten Banyuwangi. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 115–126. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i2.49504>
- Tri Suminar¹, F. J. S. S. E. M. H. H. (2022). 37974-109753-1-Pb. *Pelatihan Digital Marketing Bagi Tutor Pendidikan Kesetaraan Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan Produk*, 4(3), 304–311. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa>
- Wahidin, N., Supriyono, S., & Widiyanto, E. (2022). Pemanfaatan Sumber Belajar Berbasis Digital pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Mentari Kabupaten Malang. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 28–39. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i1.39712>

